

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)**

Fakhry Seftian Pasha
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: fakhry.seftian@upvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan ukuran entitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali periode 2020. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19. Sedangkan ukuran entitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, ukuran entitas pemerintah daerah, dan kelemahan pengendalian internal.

ABSTRACT

This research is a quantitative study that aims to analyze whether or not there is an influence of economic growth, own-source revenue (PAD), and the size of local government entities on internal control weaknesses during the COVID-19 pandemic. The population in this research were districts/cities in Java and Bali for the period 2020. This study used purposive sampling and hypothesis testing was carried out using multiple linear regression using SPSS 26. The results obtained showed that economic growth and own-source revenue (PAD) had a

significant positive effect on internal control weakness during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the size of local government entities has no significant effect on internal control weaknesses during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *economic growth, own-source revenue, size of local government entities*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan dimana daerah diberikan kewenangan otonomi secara luas dalam mengatur dan melakukan pengurusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (Akbal, 2016). Kinerja pemerintah daerah (pemda) menjadi salah satu kunci dari faktor keberhasilan suatu organisasi untuk memastikan kepuasan pelayanan publik dan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Aswar, 2019). Hal tersebut tentunya memerlukan hak untuk mengatur dan mengurus suatu daerah. Hak tersebut merupakan kekuasaan yang besar sekaligus memikul tanggung jawab yang berat, terutama jika masalah tersebut masuk ke ranah keuangan. Tidak heran bahwa peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) perlu diperhatikan dalam otonomi daerah. SPI tentunya memiliki keahlian dalam pencegahan hilangnya sumber daya dalam sebuah kelompok sebagai dampak dalam perilaku curang. (Amiseno, 2019)

“Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)” mendefinisikannya pengendalian internal ialah proses dimana mendapat pengaruh dari direktur, manajemen, entitas personel lainnya yang perancangannya bertujuan dalam memberikan rasa yakin terkait pencapaian dengan maksud yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (Yaya & Supobo, 2019). PP Nomor 60 2008 menjelaskan bahwa SPI ialah tindakan yang teratur yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan semua karyawan sampai terpenuhinya kejelasan dan maksud dari perusahaan berupa kegiatan yang efektivitas dan efisiensinya terjamin, kehandalan dalam laporan keuangan, pengamanan kekayaan yang dimiliki negara, serta rasa taat pada peraturan perundangan yang berlaku (Saferi & Mulyani, 2020).

Penjelasan yang senada dipaparkan oleh Amiseno (2019) bahwa SPI ialah deretan atau gabungan atas aturan yang telah dibuat supaya manajemen memperoleh suatu rasa yakin dalam pencapaian tujuannya dan sasaran organisasi. Sistem Pengendalian internal (SPI) tentunya dibuat agar dapat melakukan pendeteksian ada tidaknya kelemahan yang nantinya dapat menjadi penyebab permasalahan pada proses pengendaliannya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, Sistem Pengendalian internal (SPI) terutama ranah keuangan masih terbilang

jauh dari pada harapan. Perihal demikian dibuktikannya dari pada pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) rawan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Beberapa diantara kecurangan tersebut adalah temuan bantuan sosial yang salurannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan kepalsuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) (www.republika.co.id).

Kecurangan bukan hanya datang dari faktor internal saja namun faktor eksternal. Akhir-akhir ini Indonesia bahkan seluruh dunia digemparkan oleh virus COVID-19 yang tengah menyebarkan hingga memukul rata perekonomian dunia. Virus COVID-19 ini terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Adanya penyebaran bibit penyakit ini menjadikan pemerintah pusat dan daerah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menghentikan penularan virus. Beberapa kebijakan diantaranya adalah *social distancing* dan batas waktu operasional perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diiringi dengan berbagai bantuan yang datang secara langsung dan tidak langsung dari pemerintah berupa anggaran atau benda. Bantuan tersebut disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, kasus mengenai kelemahan pengendalian internal terjadi juga di Jember, yakni terkait kasus pejabat di lingkungan Pemkab Jember dan Bupati Jember, Hendy Siswanto yang mana dikabarkan menerima honor terkait pemakaman warganya yang meninggal dikarenakan COVID-19 yang kemudian adanya berita ini banyak mendapatkan kritik dan kecaman. Diduga, telah terdapat adanya aliran dana honor senilai Rp 282 Juta kepada beberapa kepala daerah serta pejabat yang telah lolos dari pengawasan (www.republika.co.id).

Fenomena-fenomena yang telah dijabarkan diatas menyimpulkan pernyataan bahwa kelemahan sistem pengendalian daerah masih tergolong kasus yang baru dan diasumsikan bisa dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan asli daerah (PAD), serta ukuran entitas pemda (*Size*). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern (KPI) di pemda dengan mempertimbangkan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta ukuran entitas pemda dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pengendalian intern yang ada saat pandemi COVID-19 juga dapat dipergunakan sebagai bentuk perbandingan antara kelemahan pengendalian intern sebelum pandemi COVID-19 maupun ketika terjadi pandemi COVID-19.

Pengembangan Hipotesis

Suatu daerah dapat disebut mengalami pertumbuhan perekonomian jika aktivitas perekonomiannya yang telah dicapai melebihi dari sebelumnya. aktivitas ekonomi biasanya terdiri atas beberapa bidang, yakni pertanian, tambang, industry hingga jasa (Iqbal, 2017). PE ialah satu dari berbagai tujuan penting yang pemda ingin capai. Hal tersebut berdasarkan

agen yang diperankan oleh pemda mendapatkan Amanah oleh prinsipal (DPRD, masyarakat dan stakeholder lainnya) agar dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat yang diaplikasikan dengan adanya pergerakan dalam perekonomian. Demi tercapainya PE maka dalam hal ini pemda memusatkan anggaran pemda pada blok-blok belanja daerah agar dapat mendorong terciptanya PE. Sebagai agen yang dapat mempertanggungjawabkan kesejahteraan rakyatnya, pemda berupaya mendapatkan PE yang tinggi sehingga memiliki kecenderungan dalam tidak memperhatikan SPI. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel pengaruh pertumbuhan ekonomi, dimana dinyatakan jika semakin tinggi PE dalam sebuah wilayah berakibat KPI menjadi lebih tinggi (Iqbal, 2017). Hal ini senada dengan penelitian dari Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) dan Majid, Herwanti, & Fitriah (2017) PE memiliki pengaruh positif atas KPI. Namun ada juga pernyataan bahwa PE tidak mempengaruhi KPI yakni penelitian dari Khairana (2017). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika yaitu:

H₁ : “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”

Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” mengenai pemda dan “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004” mengenai “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan suatu daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah”. PAD dalam pengelolaannya diurus secara mandiri oleh pemerintah daerah. Apabila PAD suatu daerah tinggi, maka akan berpeluang mempunyai kelemahan terkait pengendalian intern yang lebih besar (Iqbal, 2017). Dalam PAD, pemda berperan selaku agen serta rakyat berperan sebagai prinsipal. Pemda diberi tanggungjawab oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama dalam transparansi pengelolaan pendanaan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi daerah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel PAD, dimana dinyatakan bahwa semakin tinggi PAD pada suatu wilayah mengakibatkan kelemahan pengendalian internalnya semakin tinggi (Majid, Herwanti, & Fitriah, 2017). Penelitian dengan hasil senada didapatkan oleh Iqbal (2017), Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018), dan Alawiyah & Sumardjo (2020) yaitu PAD memiliki pengaruh yang signifikan atas KPI. Namun pernyataan PAD tidak berpengaruh signifikan dipaparkan oleh Saferi & Mulyani (2020). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika yaitu:

H₂ : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”

Size ialah suatu rentang nilai yang menunjukkan ukuran kondisi pemda (Hartono, 2014). Ukuran yang ada dalam suatu entitas biasanya berfungsi untuk mengukur adanya pengelompokan terkait ukuran suatu entitas. Dalam ukuran entitas pemerintah kaitan antara pemda dengan pemerintah pusat adalah dimana pemda selaku agen perlu melakukan pencatatan dengan baik dan sesuai standar pencatatan yang berlaku demi meningkatkan kepercayaan pemerintah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung variabel ukuran entitas pemerintah daerah dimana dinyatakan semakin luas ukuran entitas pada suatu daerah mengakibatkan kelemahan pengendalian internalnya semakin tinggi (Khairana, 2017). Pernyataan yang sama didapatkan oleh Iqbal (2017), Majid, Herwanti, & Fitriah (2017), dan Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) bahwa *size* berpengaruh signifikan atas KPI. Namun, beberapa peneliti salah satunya Saferi & Mulyani (2020) menyatakan jika *size* tidak berpengaruh atas KPI. Begitu juga pernyataan oleh Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka didapatkanlah hipotesis yang didasari oleh logika yaitu:

H₃ : “Ukuran Entitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.”

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemda provinsi di Indonesia, dengan sampel berupa pemda kabupaten/ kota pada pulau Jawa serta Bali. Penelitian ini menjadikan 122 kabupaten/kota yang berada diseluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali periode 2020 sebagai objek penelitian. Objek penelitian tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS. Dalam menghimpun sampel penelitian digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu sampel yang diambil dengan mempertimbangkan syarat tertentu yang memiliki korelasi dengan ciri dari populasi (Sugiyono, 2017). Penghimpunan data menggunakan metode dokumentasi sehingga data yang dianalisa ialah data sekunder selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengolahan data yang sudah didapat. Data yang dimaksud ialah LHP atas LKPD di pulau Jawa dan Bali periode 2020 yang didapatkan dari BPK Perwakilan Provinsi di pulau Jawa dan Bali serta data PDRB yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas pemda di Jawa serta Bali pada periode 2020. Untuk mengukur kelemahan pengendalian internal dengan rumus yaitu $KPI = \frac{\text{Jumlah temuan KPI atas LKPD}}{\text{Jumlah kasus terkait KPI terdapat dalam LPH atas LKPD}}$ dalam bagian LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Diadopsi dari Majid, Herwanti, & Fitriah (2017) nilai pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) yang diterbitkan oleh BPS. PAD dalam penelitian ini diperoleh dari nilai total PAD yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemda. (Aini, 2017). Ukuran pemerintah daerah = Total Aset (Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari, 2018), total aset diperoleh dari jumlah total aset dalam neraca di LHP atas LKPD. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji hipotesis melalui uji t dan uji R^2 menggunakan bantuan program olah data SPSS 26. Pada penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan sebelum melakukan uji hipotesis, data perlu memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu yaitu memenuhi atas uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas lalu data tersebut akan dianalisa melalui statistik deskriptif bertujuan agar dapat melihat gambaran secara umum. Adapun model regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kelemahan Pengendalian Internal (KPI)
a : Nilai konstanta
 $b_{1,2,3}$: Nilai koefisien regresi
 X_1 : Pertumbuhan Ekonomi (PE)
 X_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_n : Ukuran Entitas Pemerintah (*Size*)
e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sampel Berdasarkan Kriteria

| Kriteria Sampel Penelitian | Total |
|---|-------|
| LKPD yang telah diaudit oleh BPK di Pulau Jawa dan Bali tahun 2020 dan PDRB yang diterbitkan oleh BPS di Pulau Jawa dan Bali tahun 2020 | 123 |
| LKPD yang dikecualikan oleh BPK di Pulau Jawa dan Bali tahun 2020 | (1) |
| Jumlah Sampel | 122 |
| Jumlah tahun penelitian | 1 |
| Sampel Akhir Penelitian | 122 |

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Sampel yang akan digunakan pada awalnya sejumlah 123 namun terdapat perubahan. Perubahan sampel tersebut disebabkan oleh adanya LKPD yang dikecualikan oleh BPK yaitu LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember periode 2020, sehingga total akhir sampel penelitian ini sejumlah 122. Penelitian ini telah memenuhi semua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Pertumbuhan ekonomi (PE) diperoleh dari data PDRB yang diterbitkan oleh BPS. Menurut hasil tabel diatas, variabel pertumbuhan ekonomi terendah sejumlah diperoleh Kabupaten Badung. Sedangkan yang tertinggi pada variabel pertumbuhan ekonomi terdapat pada Kabupaten Purwakarta. Pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan menggunakan $\ln(\text{PAD})$. Peneliti mengakses data tersebut dari LRA yang terdapat pada LKPD kabupaten/kota. PAD terkecil diperoleh Kabupaten Bangli dan PAD tertinggi diperoleh DKI Jakarta. Ukuran entitas pemda (*Size*) dihitung dengan $\ln(\text{Total Aset})$. Size terkecil dimiliki oleh Kabupaten Klungkung sedangkan yang terbesar dimiliki Kabupaten Kediri. Kelemahan pengendalian intern (KPI) diukur dengan menggunakan jumlah temuan kasus terkait sistem pengendalian intern yang didapatkan dari LHP atas LKPD dalam bagian LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Kelemahan pengendalian intern terkecil terdapat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kab. Banjarnegara, Kab. Demak, Kota Pekalongan, Kota Yogyakarta, Kota Cilegon, Kab. Buleleng, dan Kota Denpasar berbeda dengan jumlah kelemahan pengendalian intern terbesar diraih oleh DKI Jakarta.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------|-----|----------|----------|------------|----------------|
| PE | 122 | -0,16520 | 0.02420 | -0,0244664 | 0,02340920 |
| PAD | 122 | 25,37078 | 31,25309 | 26,8322375 | 0,89579412 |
| SIZE | 122 | 27,75902 | 36,13210 | 29,2084637 | 1,01502640 |
| KPI | 122 | 4,00000 | 66,00000 | 11,5081967 | 6,38728839 |
| Valid N | 122 | | | | |
| (listwise) | | | | | |

Sumber : Data diolah Peneliti

Tabel 3. Uji T

| Model | Coefficients | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | Std. Error | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| 1 (Constant) | -71,775 | 16,976 | | -4,228 | 0,000 |
| PE | 46,917 | 22,872 | 0,172 | 2,051 | 0,042 |
| PAD | 1,858 | 0,833 | 0,261 | 2,231 | 0,028 |
| SIZE | 1,184 | 0,730 | 0,188 | 1,622 | 0,107 |

a. Dependent Variable: KPI

Sumber : Data diolah Peneliti

Menurut uji hipotesis yang dilakukan terhadap variabel yang terdapat dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi mendapatkan skor t hitung sejumlah 2,051 atau melebihi dari t tabel sejumlah 1,98027 ($2,051 > 1,98027$) dan untuk perhitungan signifikansinya ialah sejumlah 0,042 kurang dari 0,05 ($0,042 < 0,05$). Hal tersebut membuktikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Selanjutnya pada variabel pendapatan asli daerah, memperoleh t hitung sejumlah 2,231 atau melebihi dari t tabel sejumlah 1,98027 ($2,231 > 1,98027$). Sedangkan untuk perhitungan signifikansinya menunjukkan angka 0,028 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Selanjutnya pada variabel ukuran entitas pemerintah daerah menunjukkan t hitung sejumlah 1,622 atau kurang dari t tabel sebesar 1,98027 ($1,622 < 1,98027$) dan untuk signifikansinya menunjukkan skor 0,107 atau melebihi dari 0,05 ($0,107 > 0,05$). Hal tersebut membuktikan variabel ukuran entitas pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kelemahan pengendalian intern.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,432 ^a | 0,186 | 0,166 | | 5,83425901 |

a. Predictors: (Constant), SIZE, PE, PAD

b. Dependent Variable: KPI

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah 0,166 atau sebesar 16,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kelemahan pengendalian intern dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan ukuran entitas 16,6% dari 100%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal dan hasil penelitian pada variabel pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 memiliki arah yang positif terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kelemahan pengendalian intern akan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi diketahui dengan menggunakan data PDRB kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali yang diterbitkan oleh BPS. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa nilai *mean* dari pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,0244664 < 3,67$ yang diklasifikasikan rendah. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Pada nilai t hitung, variabel pertumbuhan ekonomi mendapatkan hasil sebesar 2,051 yang mana lebih besar dari t tabel yang berjumlah 1,98027.

Mendukung teori keagenan dimana makin tinggi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan oleh suatu daerah maka semakin tinggi juga tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian intern. Jika suatu daerah tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengawasan atas daerahnya maka daerah tersebut kurang mampu dalam menjalankan perintah prinsipal untuk melakukan pengendalian intern yang baik yang mengakibatkan naiknya tingkat kelemahan pengendalian intern. Sebaliknya jika pemerintah dapat menjalankan pengelolaan perekonomian dengan baik maka jumlah kelemahan pengendalian intern dapat di minimalisir.

Selaras dengan penelitian Iqbal (2017) yang diperoleh dari populasi penelitian di 31 Kabupaten Kota pada Provinsi Riau dan Sumatera Barat, yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh atas kelemahan pengendalian intern. Selain itu, pernyataan

positif juga didukung oleh penelitian Majid (2017) yang memiliki hasil dimana menunjukkan PE berpengaruh secara positif pada kelemahan SPI yang mana tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah memiliki peluang besar dalam peningkatan jumlah temuan pada kelemahan SPI. Sehingga menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah maka akan berpeluang besar dalam jumlah temuan atas kelemahan pengendalian intern. Penelitian oleh Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) juga memiliki hasil yang selaras yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil berbeda terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern terdapat pada penelitian Aini (2017) yang didasarkan pada total sampel yang berjumlah sebanyak 66. Hasil hipotesis yang bisa dipaparkan dari penelitian itu ialah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil dari penelitian pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat pandemi COVID-19 tahun 2020 ini ialah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Sehingga apabila pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah semakin tinggi, maka kelemahan pengendalian internal juga akan lebih banyak. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan skor *mean* dari PAD sebesar $26,8322375 > 3,67$ yang diklasifikasikan tinggi. Menurut hasil uji t, PAD mendapatkan skor signifikan sejumlah 0,028 hasil ini kurang dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05 serta dengan t hitung sejumlah 2,231 yang melebihi dari t tabel sejumlah 1,98027. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap KPI, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan dimana prinsipal memberikan amanah agar agen dapat mengelola keuangan daerahnya. Tanggung jawab agen terhadap prinsipal tersebut semakin besar mengingat jumlah PAD yang tinggi juga. Jika pemerintah daerah tidak dapat mengelola secara optimal maka pmda tersebut dinilai kurang mampu menjalankan perintah prinsipal dalam mengelola keuangan daerahnya. Ketika pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik hal tersebut akan menimbulkan peningkatan kelemahan pengendalian intern dalam daerah tersebut, oleh karena itu pemerintah daerah harus mengelola pendapatan asli daerah dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kenaikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pmda yang memiliki PAD yang jumlahnya tinggi maka kelemahan SPI memiliki jumlah lebih banyak selaras dengan data penelitian yaitu PAD tertinggi terdapat pada pemerintah

daerah DKI Jakarta sebesar 31,25309 dan DKI Jakarta juga merupakan pemda yang memiliki jumlah kelemahan pengendalian internal yang paling tinggi yaitu sejumlah 66. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap KPI selaras dengan yang disampaikan dalam penelitian Iqbal (2017) yang disampaikan dengan hasil variabel pendapatan asli daerah mendapatkan t hitung sejumlah 2,707 melebihi t tabel yaitu 2,039 dan untuk nilai signifikansinya sejumlah 0,012 lebih kecil dari 0,05. Selain itu penelitian dari Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) juga mengungkapkan hasil yang sama. Perbedaan terdapat dalam penelitian oleh Majid (2017) yang mana menyatakan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Ukuran Entitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil dari penelitian pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali saat pandemi COVID-19 tahun 2020 ini ialah kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh ukuran entitas pemerintah daerah. Sehingga jika ukuran entitas yang dimiliki suatu pemerintah daerah meningkat, maka belum tentu kelemahan pengendalian intern mengalami perubahan baik meningkat atau pun menurun. Dibuktikan dengan hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa nilai *mean* dari ukuran entitas sebesar 29,2084637 yang mana diklasifikasikan tinggi karena melebihi nilai 3,67. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran entitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107 hasil ini lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 serta dengan t hitung sebesar 1,622 yang mana lebih kecil dari t tabel 1,98027. Hasil dalam uji t tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana t hitung harus lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 sehingga dari hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa ukuran entitas pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa ukuran entitas pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern maka hal tersebut dikaitkan dengan teori keagenan memiliki arti bahwa pemerintah daerah selaku agen telah mampu menjalankan amanah dari prinsipal karena telah melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap aset secara baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan yang dilakukan oleh Majid, Herwanti, & Fitriah (2017) dan juga Rahmiyatun, Muchtar, & Lestari (2018) yang berisikan bahwa kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh ukuran entitas pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yaya dan Srisuprobo (2019) melalui hasil penelitiannya yang dilakukan terhadap seluruh 34 provinsi di Indonesia yaitu ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berbeda dengan penelitian oleh Iqbal (2017) yang dilakukan pada 31 Kabupaten Kota di Provinsi Riau dan Sumatera Barat, ukuran pemerintah berpengaruh pada kelemahan pengendalian intern. Sepakat dengan Iqbal (2017) penelitian yang dilakukan pada Kementerian PUPR oleh Fadillah, Afiah, & Pratama (2019) menyatakan bahwa ukuran entitas memiliki pengaruh signifikan pada kelemahan pengendalian intern.

PENUTUP

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 memberikan pengaruh positif dalam kelemahan pengendalian intern yang ada dalam daerah tersebut sehingga jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kelemahan pengendalian intern akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat disebabkan apabila suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun daerah tersebut tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengawasan secara baik maka akan mengakibatkan pemerintah daerah tersebut tidak dapat melaksanakan pengendalian intern secara maksimal. PAD berpengaruh positif signifikan atas kelemahan pengendalian intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa saat pandemi COVID-19 tahun 2020 pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif dalam kelemahan pengendalian intern suatu daerah sehingga apabila pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah semakin tinggi, maka kelemahan pengendalian internal juga akan lebih banyak. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah tidak mampu mengelola pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga terdapat kelemahan dalam pengendalian internalnya yang ditandai dengan bertambahnya jumlah temuan terkait permasalahan dalam pengendalian intern. Ukuran entitas pemerintah daerah tidak berpengaruh atas kelemahan pengendalian intern. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa saat pandemi COVID-19 tahun 2020 kelemahan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh dari ukuran entitas pemerintah daerah. Sehingga apabila ukuran entitas suatu pemerintah daerah tinggi maka belum tentu kelemahan pengendalian internnya akan tinggi juga. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap aset yang dimiliki.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terdapat satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak bisa dipublikasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi terkait dikarenakan LHP tersebut termasuk kedalam informasi yang dikecualikan karena masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Kabupaten/kota yang

dimaksud adalah kabupaten Jember. Akibatnya kabupaten Jember tersebut tidak dapat dijadikan sampel sehingga sampel yang awalnya berjumlah 123 berkurang menjadi 122 sampel. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti kelemahan pengendalian internal di Indonesia dengan menggunakan cakupan data yang lebih luas lagi dan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lainnya seperti belanja modal, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, dan faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian internal. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperluas periode penelitian. Hal tersebut dapat membantu ketepatan dan keakuratan dalam penelitian yang akan datang. Bagi pemerintah daerah khususnya pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan terkait pengendalian internal di daerahnya. Mengingat saat pandemi COVID-19 tahun 2020 rata-rata tingkat kelemahan pengendalian internal di Pulau Jawa dan Bali sebesar 11,508 (1.1508%) yang diklasifikasikan tinggi yang berarti pada tahun 2020 jumlah temuan terkait pelanggaran pengendalian intern memiliki jumlah yang banyak. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali diklasifikasikan rendah yang terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai arah yang negatif yaitu sebesar -0,0242 (-2,42%).

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004)
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (2004)
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008)
- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustini, D. M. S., and Astika, I. B. P. (2021). *The Effect of Effectiveness of Internal Control And Organizational Justice On The Accounting Fraud Tendencies*. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR). 5(8), 168-176.

- Aini, F. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2012)*. 4(1), 777-789.
- Akbal, M. (2016). *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. SUPREMASI Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya, 11(2), 99-107.
- Alawiyah, T. T., Sumardjo, M., dan Darmastuti, D. (2020). *Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(3), 415-424.
- Amiseno, A. (2019). *Analisa Perbandingan Statistik Kelemahan SPI dan Biaya Politik sebagai Pemoderasi Kerugian Keuangan Daerah pada Belanja Daerah*. J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika, 12(2), 17-22.
- Arens, A. A. (2012). *Jasa Audit dan Assurance Edisi 14*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A. (2014). *Auditing and Assurance Service: An Integrate Approach 14th Edition*. England: Person Education Limited.
- Aswar, K. (2019). *Financial Performance of Local Governments in Indonesia*. European Journal of Business and Management Research (EJBMR), 4(6), 1-6.
- Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). *Factors Influencing the Information Quality of Local Government Financial Statement and Financial Accountability*. Management Science Letters, 9, 1373-1384.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19*. In Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 107-134
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumilan, S. P., and Putra, R. D. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat*. Academic Conference For Accounting, 1(1), 278-288.
- Hartono, R. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2011*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.

- Honor Pemakaman Korban Covid Untuk Bupati Jember Bikin Heran* (2021). Diakses pada 27 September 2021, dari <https://republika.co.id/berita/qytjf6282/honor-pemakaman-korban-covid-untuk-bupati-jember-bikin-heran>
- Iqbal, M. (2017). *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Barat)*. JOM FEKON Riau University, 4(1), 881-895.
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Finance Economic, 3, 305-360.
- Khairana, W., dan Subardjo, A. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sdm, Kompleksitas dan Ukuran Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(5), 1-19.
- Lidyana, V. (2020). *Duit Daerah Nganggur Rp184T, Pemda Siap-Siao 'Dijewer' Sri Mulyani*. Diakses pada 26 September 2021, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4859978/duit-daerah-nganggur-rp-184-t-pemda-siap-siap-dijewer-sri-mulyani?_ga=2.166911799.803502408.1628056652-1585728819.1605080639
- Maabuat, J. S., Morasa, J., dan Saerang, D. P. (2016). *Pengaruh Kelemahan sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-Riata Laporan Keuangan pemerintah Daerah di Indonesia*. Accountability, 5, 52-62.
- Maharani, E. (2016). *Ini Tiga Kecurangan Pemda Yang Diungkap BPK*. Diakses pada 27 September 2021, dari <https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/13/o3z45i335-ini-tiga-kecurangan-pemda-yang-diungkap-bpk>
- Majid, A., Herwanti, Rr. T., dan Fitriah, N. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern*. JMM UNRAM-Master of Management Journal, 6(1), 3-7.
- Mehta, C., dan Patel, N. *IBM SPSS Exact Test*. IBM Corporation. 1-31.
- Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya*. Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mustafa, B., dan Mahyus, M. (2017). *Determinan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Barat*. Jurnal Eksos Politeknik Negeri Pontianak. 13(2), 112-131.
- Rahmadi, D. (2021). *Mendagri Imbau Kepala Daerah Manfaatkan Keuangan Pemda Untuk Covid-19*. Diakses pada 27 September 2021, dari

<https://m.merdeka.com/peristiwa/mendagri-imbau-kepala-daerah-manfaatkan-keuangan-pemda-untuk-covid-19.html>

- Rahmiyatun, F., Muchtar, E., dan Lestari, R. (2018). *Kajian Mengenai Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Mitra Manajemen, 2, 13-23.
- Rai, A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Realisasi Anggaran Pemda Masih Mini, Baru 8% Dari Total Yang Bisa Dibelanjakan*. (2021). Diakses pada 27 September 2021, dari <https://insight.kontan.co.id/news/realisasi-anggaran-pemda-masih-mini-baru-8-dari-total-yang-bisa-dibelanjakan>
- Riyanto, S., dan Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saferi, M., dan Mulyani, E. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2234-2249.
- Sahara, W. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Diakses pada 26 September 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>
- Samhah, H., dan Handayani, N. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas, Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(2), 1-19.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sebayang, J. V., and Fachruddin, F. N. N. (2018). *Analysis of Factors Affecting Weaknesses Of Internal Control System At District And City Governments In North Sumatra Province*. Journal of Public Budgeting, Accounting, and Finance (JPBAF) of North Sumatra University.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, C. M., dan Ardini, L.. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(7), 1-17.
- Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). *Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia*. Journal of Accounting and Investment, 20, 296-309.